PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDAGANGAN TIMAH MURNI BATANGAN MELALUI BURSA TIMAH

(Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015, tanggal 27 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015, perlu adanya suatu pedoman teknis Perdagangan Ekspor Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDAGANGAN TIMAH MURNI BATANGAN MELALUI BURSA TIMAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Bursa Timah adalah pasar timah internasional dan dalam negeri di Indonesia yang merupakan pasar terorganisir dan bagian dari Bursa Berjangka.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
4. Timah Murni Batangan adalah Timah Murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9% yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Smelter.
5. Kontrak Timah Murni Batangan adalah suatu bentuk kontrak standar untuk menjual atau membeli Timah Murni Batangan di Bursa Timah.
6. Penjual adalah badan usaha Anggota Bursa Berjangka dan Anggota Lembaga Kliring Berjangka yang melakukan transaksi penjualan Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun dijual di dalam negeri melalui Bursa Timah.
7. Pembeli Anggota Bursa Berjangka adalah badan usaha Anggota Bursa Berjangka dan Anggota Lembaga Kliring Berjangka yang melakukan transaksi pembelian Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor melalui Bursa Timah untuk diri sendiri dan kelompok usahanya.
8. Pembeli Peserta Bursa Berjangka adalah badan usaha atau perorangan Peserta Bursa Berjangka yang melakukan transaksi pembelian Timah Murni Batangan dalam negeri melalui Bursa Timah untuk diri sendiri dan kelompok usahanya.
9. Lembaga Kliring Timah adalah bagian dari Lembaga Kliring Berjangka yang menyelenggarakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor di Bursa Timah.
10. Pengelola Tempat Penyimpanan adalah Pihak yang ditunjuk oleh Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Timah Murni Batangan kepada Pembeli sesuai dengan Kontrak Timah Murni Batangan.
11. Bukti Simpan Timah atau BST adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Timah Murni Batangan yang disimpan oleh Penjual.
12. Jaminan Transaksi Timah adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Pembeli Anggota Bursa Berjangka dan Anggota Lembaga Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Timah sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah.
13. Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bursa Timah sebagai tanda bukti pembelian Timah Murni Batangan.
14. Delivery Order (DO) adalah Bukti Pemesanan Timah Murni Batangan yang dikeluarkan oleh Penjual Anggota Bursa Berjangka kepada Pembeli Peserta Anggota Bursa Berjangka untuk perdagangan Timah Murni Batangan dalam negeri.
15. Clearing Statement adalah laporan posisi keuangan Anggota Lembaga Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Timah.
16. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor timah.

Pasal 2

- (1) Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah.
- (2) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. memiliki Pos Tarif/HS 8001.10.00.00;
 - b. memiliki kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9% yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Smelter;
 - c. memiliki jumlah unsur pengotor lainnya paling

tinggi 0,1% dengan kadar masing-masing sebagai berikut:

- 1) Besi (Fe) : $\leq 0,005\%$ (50 ppm);
- 2) Aluminium (Al): $\leq 0,001\%$ (10 ppm);
- 3) Arsenik (As): $\leq 0,03\%$ (300 ppm);
- 4) Bismuth (Bi): $\leq 0,015\%$ (150 ppm);
- 5) Kadmium (Cd): $\leq 0,001\%$ (10 ppm);
- 6) Tembaga (Cu): $\leq 0,015\%$ (150 ppm);
- 7) Timbal (Pb) : $\leq 0,030\%$ (300 ppm);
- 8) Antimoni (Sb): $\leq 0,015\%$ (150 ppm); dan/
atau
- 9) Seng (Zn) : $\leq 0,001\%$ (10 ppm).

d. memiliki dimensi ukuran:

- 1) panjang atas 410 - 540 mm;
- 2) panjang bawah 270 - 390 mm;
- 3) lebar atas 100 - 160 mm;
- 4) lebar bawah 88 - 125 mm; dan
- 5) tinggi 64 - 125 mm.

e. memiliki berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan sebesar 25 Kgdengan toleransi : ± 2 Kg; dan

f pengemasan paling banyak sejumlah 40 batang dengan total berat 1.000 Kg ± 20 Kg per kemasan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikecualikan untuk Timah Murni Batangan yang diperdagangkan di dalam negeri.

(4) Dimensi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

(5) Kontrak Timah Murni Batangan yang diperdagangkan di Bursa Timah untuk tujuan ekspor maupun dalam negeri meliputi:

- a. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, $\leq 0,005\%$ Fe, dan 0,030% Pb;
- b. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, $\leq 0,005\%$ Fe, dan 0,020 % Pb;
- c. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, $\leq 0,005\%$ Fe, dan 0,010 % Pb;
- d. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, $\leq 0,005\%$ Fe, dan 0,005 % Pb; dan
- e. Kontrak Timah Murni Batangan 99,99% Sn.

Pasal 3

(1) Perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah hanya dapat dilakukan oleh Bursa Berjangka yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti.

(2) Bursa Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

- a. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Anggota dan Peserta Bursa Berjangka untuk memperoleh harga yang wajar dan jaminan kualitas barang sesuai ketentuan; dan
- b. Tujuan pembentukan Bursa Timah untuk menjadi acuan harga timah internasional dan dalam negeri serta untuk mengoptimalkan kontribusi pendapatan negara Republik Indonesia dan pengembangan industri hilir dalam negeri.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Bursa Timah

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, maka Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berhak:

- a. menerima Anggota dan Peserta Bursa Berjangka yang melakukan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan keanggotaan dan kepesertaan;
- b. menunjuk Pengelola Tempat Penyimpanan yang akan melakukan penyimpanan barang milik Penjual dan menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST;
- c. mengusulkan Kontrak Timah Murni Batangan yang diperdagangkan melalui Bursa Timah untuk mendapat Persetujuan dari Bappebti;
- d. membentuk Komite Produk Timah; dan
- e. menetapkan tempat penyimpanan dan pelabuhan muat Timah.

(2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, maka Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) wajib:

- a. menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan online yang terpercaya, terbuka serta terkoneksi dengan Lembaga Kliring Timah dan telah diperiksa oleh Bappebti;
 - b. menerbitkan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB; dan
 - c. menyediakan sarana penyelesaian perselisihan.
- (3) Persyaratan dan Tata cara penerimaan Anggota dan Peserta Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Timah.

Bagian Kedua
Lembaga Kliring Timah
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, Lembaga Kliring Berjangka berhak:
- a. menerima Anggota Lembaga Kliring Berjangka yang melakukan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan keanggotaan; dan
 - b. meminta Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengeluarkan Timah Murni Batangan dari Tempat Penyimpanan untuk tujuan Ekspor setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, Lembaga Kliring Berjangka wajib:
- a. menyediakan sistem elektronik yang terpercaya, terbuka serta terkoneksi dengan Bursa Timah dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah diperiksa oleh Bappebti;
 - b. melakukan kerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan Surveyor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerimaan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Timah.

Bagian Ketiga
Anggota Bursa Timah
Pasal 6

- (1) Penjual dan Pembeli Anggota Bursa Berjangka wajib menjadi Anggota Bursa Berjangka dan Anggota Lembaga Kliring Berjangka, dan mendapat sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka dari Bappebti.
- (2) Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai Eksportir Terdaftar (ET) Timah Murni Batangan dan memiliki Persetujuan Ekspor (PE) yang berlaku aktif yang diterbitkan oleh Kernenterian Perdagangan.
- (3) Pembeli Anggota Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan pengguna Timah Murni Batangan atau perusahaan dagang pengguna Timah Murni Batangan.

Bagian Keempat
Peserta Bursa Timah
Pasal 7

- (1) Pembeli Peserta Bursa Berjangka wajib menjadi Peserta Bursa Berjangka.
- (2) Pembeli Peserta Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha atau perorangan pengguna Timah Murni Batangan.
- (3) Pembeli Peserta Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki hak untuk melakukan transaksi fisik pembelian Timah Murni Batangan dalam negeri.

Bagian Kelima
Pengelola Tempat Penyimpanan
Pasal 8

- (1) Pengelola Tempat Penyimpanan berhak:
- a. menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST atas Timah Murni Batangan yang disimpan oleh Penjual Timah Murni Batangan; dan
 - b. mengatur penyerahan Timah Murni Batangan kepada Pembeli Anggota Bursa Berjangka dan Pembeli Peserta Bursa Berjangka.
- (2) Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. melakukan kerjasama dengan Bursa Berjangka

- dan/atau Lembaga Kliring Berjangka;
- b. menyediakan tempat penyimpanan dan sistem pengelolaan penyimpanan yang terpercaya dan terkoneksi dengan Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - c. memastikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dipersyaratkan bagi Penjual.

Bagian Keenam

Surveyor

Pasal 9

- (1) Surveyor wajib melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap Timah Murni Batangan yang diserahkan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan mengenai data atau keterangan keabsahan administrasi, wilayah asal, jenis, jumlah, dan kualitas Timah Murni Batangan.
- (2) Surveyor wajib melakukan verifikasi sertifikat Clear and Clean (CnC) dan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III

TATACARAPERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Perdagangan Timah Murni Batangan

untuk Tujuan Ekspor

Pasal 10

- (1) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di Bursa Timah wajib diverifikasi oleh Surveyor yang mencakup paling sedikit:
 - a. kejelasan asal bahan baku Timah Murni Batangan; dan
 - b. kualitas Timah Murni Batangan.
- (2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan dokumen hasil verifikasi berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Biji Timah dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memiliki sertifikat Clear and Clean (CnC) dan Certificate of Analysis (CoA) sesuai dengan ketentuan.
- (3) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib disimpan oleh Penjual pada Pengelola Tempat Penyimpanan yang ditunjuk oleh Bursa Timah.

- (4) Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST atas nama Penjual.
- (5) Dokumen hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Bukti Simpan Timah atau BST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diserahkan kepada Lembaga Kliring Timah untuk keperluan transaksi di Bursa Timah.
- (6) Pembeli Anggota Bursa Berjangka wajib menempatkan Jaminan Transaksi kepada Lembaga Kliring Timah sebagai jaminan pelaksanaan transaksi di Bursa Timah.

Pasal 11

- (1) Transaksi jual beli Timah Murni Batangan di Bursa Timah dilakukan dengan sistem lelang terbuka secara elektronik on-line.
- (2) Penjual memasukan harga penawaran lelang jual selama jam perdagangan Timah Murni Batangan sesuai dengan spesifikasi Kontrak Timah Murni Batangan.
- (3) Pembeli Anggota Bursa Berjangka memasukan harga permintaan lelang beli selama jam perdagangan Timah Murni Batangan sesuai dengan spesifikasi Kontrak Timah Murni Batangan.
- (4) Lembaga Kliring Timah wajib memberitahukan kepada Penjual dan Pembeli Anggota Bursa Berjangka atas terjadinya transaksi dengan menerbitkan alokasi perdagangan dan Clearing Statement.
- (5) Alokasi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi paling sedikit:
 - a. nama Penjual;
 - b. nama Pembeli;
 - c. jumlah lot;
 - d. harga; dan
 - e. pelabuhan muat.

Pasal 12

- (1) Pembeli Anggota Bursa Berjangka wajib melakukan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Timah.
- (2) Lembaga Kliring Timah menyerahkan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB asli kepada

Pengelola Tempat Penyimpanan setelah menerima pembayaran dari Pembeli Anggota Bursa Berjangka.

- (3) Pembeli Anggota Bursa Berjangka wajib memberitahukan instruksi pengapalan (shipping instruction) kepada Penjual dan Lembaga Kliring Timah.
- (4) Instruksi pengapalan (shipping instruction) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal penerbitan instruksi pengapalan (shipping instruction);
 - b. nomor instruksi pengapalan (shipping instruction);
 - c. identitas eksportir terdaftar (ET) Timah Murni Batangan;
 - d. identitas penerima (consignee details);
 - e. perincian barang;
 - f. nama moda transportasi laut;
 - g. pelabuhan pemuatan;
 - h. pelabuhan tujuan;
 - i. jumlah muatan (per BST);
 - j. jumlah kontainer; dan
 - k. jenis pengiriman.
- (5) Lembaga Kliring Timah wajib menyerahkan permintaan pengeluaran Timah Murni Batangan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan setelah menerima pembayaran dan instruksi pengapalan (shipping instruction) dari Pembeli Anggota Bursa Berjangka.
- (6) Penjual wajib menyerahkan dokumen ekspor kepada Pengelola Tempat Penyimpanan setelah menerima instruksi pengapalan (shipping instruction) dari Pembeli Anggota Bursa Berjangka.
- (7) Dokumen ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit meliputi:
 - a. surat kuasa pengapalan;
 - b. Invoice;
 - c. packing list;
 - d. daftar timbang (weight list);
 - e. bukti pembayaran iuran produksi royalti yang telah diverifikasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - f. daftar verifikasi asal-usul bijih timah dan Surat

Keterangan Asal (SKA);

- g. Certificate of Analysis (CoA); dan
 - h. Laporan Surveyor (LS).
- (8) Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab atas fisik Timah Murni Batangan sampai dengan ditempatkan pada moda transportasi laut di pelabuhan pemuatan.
 - (9) Tanggung jawab Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. tempat penyimpanan;
 - b. pengangkutan ke pelabuhan pemuatan;
 - c. pengawalan;
 - d. pemuatan sampai ke atas moda transportasi laut; dan
 - e. pengurusan dokumen ekspor.
 - (10) Lembaga Kliring Timah wajib melakukan penyelesaian hak keuangan Penjual atas transaksi yang terjadi sesuai dengan Laporan Kliring (Clearing Statement).

Pasal 13

Tata Cara Perdagangan Timah Murni Batangan untuk Tujuan Ekspor melalui Bursa Timah diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.

Bagian Kedua

Perdagangan Timah Murni Batangan di Dalam Negeri

Pasal 14

- (1) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di Bursa Timah wajib diverifikasi oleh Surveyor yang mencakup paling sedikit:
 - a. kejelasan asal bahan baku Timah Murni Batangan; dan
 - b. kualitas Timah Murni Batangan.
- (2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan dokumen hasil verifikasi berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Bijih Timah dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memiliki sertifikat Clear and Clean (CnC) dan Certificate of Analysis (CoA) sesuai dengan ketentuan.
- (3) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud

pad a ayat (1) wajib disimpan oleh Penjual pad a Pengelola Tempat Penyimpanan yang ditunjuk oleh Bursa Timah.

- (4) Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) wajib menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST atas nama Penjual.
- (5) Pengelola Tempat Penyimpanan wajib melakukan penatausahaan Timah Murni Batangan yang dimiliki oleh Penjual.
- (6) Pembeli Peserta Bursa Berjangka wajib melakukan pendaftaran sebagai Peserta Bursa Berjangka.

Pasal 15

Transaksi jual beli Timah Murni Batangan dalam negeri wajib dilakukan antara Penjual dan Pembeli Peserta Bursa Berjangka melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh Bursa Timah.

Pasal 16

- (1) Penjual wajib menyerahkan Bukti Faktur Pajak, Bukti Bayar Royalti dan Delivery Order (DO) kepada Bursa Berjangka setelah terjadi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Bursa Berjangka menerbitkan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB asH serta Instruksi Pengeluaran Timah Murni Batangan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Penjual.
- (3) Pengelola Tempat Penyimpanan menyerahkan Timah Murni Batangan kepada Pembeli Peserta Bursa Berjangka setelah menerima Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB asli serta Instruksi Pengeluaran Timah Murni Batangan dari Bursa Berjangka.
- (4) Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggungjawab atas fisik Timah Murni Batangan sampai dengan diserahkan kepada Pembeli Peserta Bursa Berjangka.

Pasal 17

Tata Cara Perdagangan Timah Murni Batangan di dalam negeri melalui Bursa Timah diatur lebih

lanjut dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.

BAB IV

PENYELESAIANPERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan di Bursa Timah, Penjual dan Pembeli mengupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Penjual dan Pembeli wajib menggunakan sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Timah.

BAB V

PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Bappebti ini, maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 121/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan Untuk Tujuan Ekspor Melalui Bursa Timah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015
**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

ttd.
SUTRIONO EDI

(BN)